

**PROGRAM KERJA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2018**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG –RI**

**Jl. JENDERAL A. YANI Kav 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat (13011)**

**POGRAM KERJA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG - RI
TAHUN ANGGARAN 2018**

=====

**BAB I
PENDAHULUAN**

Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan dan badan peradilan dibawahnya. Fungsi pokok manajemen perlu dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang meliputi bidang administrasi, organisasi dan finansial .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang memiliki orientasi dan keterukuran output dan outcome sebagai sarana penilaian indikator keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kinerja Badan Pengawasan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan *good governance* yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka menunjang tugas Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga meliputi organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dalam program kerja Badan Pengawasan tercantum pembinaan dan koordinasi pengawasan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan peranan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, serta penanganan pengaduan di wilayah hukumnya dengan maksud agar pengawasan yang dilakukan pengadilan tingkat banding bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BAB II

VISI, MISI, SASARAN, DAN TANTANGAN

A. Visi

Mewujudkan pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
2. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

C. Motto/Nilai

Profesional, transparan dan komitmen.

D. Sasaran

1. Tersedianya rencana pengawasan.
2. Tersedianya bahan kebijakan pengawasan.
3. Tersedianya sumber daya pengawas yang berkualitas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.
5. Terlaksananya pengawasan melekat dan fungsional.
6. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat.
7. Tersedianya perangkat publikasi kegiatan pengawasan.

E. Tantangan

1. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Masih rendahnya dukungan yang berkelanjutan dan komitmen baik dari internal maupun eksternal secara terus menerus.
4. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
5. Implementasi Sistem Informasi Pengawasan secara menyeluruh.
6. Harapan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Badan Pengawasan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta jendela Mahkamah Agung sehingga menuntut adanya integritas tinggi, profesionalisme serta kreatif dan komunikatif dalam meniyasati kelemahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB III

KONDISI DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Badan Pengawasan yaitu :

1. Kelembagaan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Badan Pengawasan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan susunan organisasi yang terdiri satu sekretariat Badan dan empat Inspektorat.

2. Sumber Daya Manusia.

- a. Jumlah Eselon II (Inspektur Wilayah I,II,III, IV) berjumlah 3 orang.
- b. Jumlah Eselon II (Sekretaris Badan Pengawasan MA RI) berjumlah 1 orang.
- c. Jumlah Hakim Tinggi Pengawas sampai dengan Januari 2018 berjumlah 37 orang sedangkan idealnya 66 orang.
- d. Jumlah Hakim Yustisial sampai dengan Januari 2018 berjumlah 17 orang sedangkan idealnya 20 orang.
- e. Tenaga fungsional auditor sampai dengan Januari 2018 berjumlah 12 orang sedangkan idealnya 33 orang.
- f. Tenaga fungsional auditor kepegawaian sampai dengan Januari 2018 berjumlah 9 orang sedangkan idealnya 33 orang.
- g. Pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 15 orang.
- h. Tenaga fungsional kepegawaian pada Badan Pengawasan berjumlah satu orang dan idealnya sebanyak 10 orang.
- i. Jumlah tenaga staf yang ada sebanyak 39 orang sedangkan idealnya sebanyak 50 orang, sementara kekurangan tenaga diisi oleh tenaga honorer 16 orang diantaranya 5 orang untuk pengemudi

3. Sumber Dana

Anggaran Badan Pengawasan tahun 2018 sebesar Rp. 32.589.054.000,-

4. Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kelancaran Tupoksi Badan Pengawasan perlu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Biro Umum dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana perkantoran Lt 11 (ruang Hakim Tinggi Pengawas) yang tidak teralokasi dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sehingga semua dapat bekerja secara profesional dan nyaman.

5. Lingkup Kerja Badan Pengawasan.
Lingkup kerja Badan Pengawasan meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di semua lingkungan peradilan ± 832 satuan kerja dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau dan sering menghadapi kendala di bidang transportasi, komunikasi, iklim, cuaca, hambatan-hambatan geografis, politik, sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Selain itu dengan adanya kebijakan dua DIPA di setiap satker berdampak pada luasnya cakupan pemeriksaan yang mencapai ± 1656 unit pelaporan.
6. Sasaran pengawasan meliputi: penyelenggaraan peradilan, perilaku hakim dan aparat peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan resiko bahaya terhadap fisik dan mental.
7. Wajah Peradilan Dewasa ini.
 - a. Harus disadari dan diakui bahwa salah satu situasi dan kondisi kritis yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini adalah merosotnya kehormatan dan wibawa lembaga peradilan sampai pada titik paling rendah yang belum pernah terjadi sampai saat ini dalam sejarah peradilan di Indonesia, disebabkan oleh lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dunia peradilan.
 - b. Kondisi demikian muncul dari akumulasi kekecewaan para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya yang diakibatkan oleh buruknya mutu pelayanan publik peradilan yang merupakan muara dari berbagai tindakan dan sifat negatif para aparat peradilan antara lain yang perlu membenahan secara terus menerus.
8. Tantangan Kedepan.
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi berkesimpulan bahwa situasi dan kondisi dunia peradilan di Indonesia sekarang ini telah berada pada titik kritis yang harus diperbaiki.

B. PERMASALAHAN.

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme dan kinerja Badan Pengawasan yang efisien, efektif dan fleksibel.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Badan Pengawasan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan holistik terhadap pengembangan yang diperoleh atas analisis menyeluruh penyebab kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang ideal.
2. Memprioritaskan kelancaran pelaksanaan pengawasan dan strategi pengurangan kesenjangan berbagai komponen baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan.
3. Merancang tindakan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi keseluruhan dalam proses pelaksanaan pengawasan.
4. Memperkuat fungsi Badan Pengawasan sebagai Quality Assurance Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya..
5. Penyusunan Modul Handbook Pengawasan terhadap Pengadilan Niaga
6. Melakukan sosialisasi pengawasan ke daerah-daerah.
7. Mempublikasikan kegiatan pengawasan dan hasil-hasilnya agar diketahui masyarakat melalui teknologi informasi.
8. Melakukan koordinasi, komunikasi dan evaluasi wilayah secara intensif dan sistimatis.
9. Mengefektifitaskan kerjasama antar Instansi
10. Memperbaiki Sistem Perencanaan berbasis Manajemen Risiko.
11. Peningkatan SDM Pengawasan dengan menambah jumlah personil Hakim Tinggi dan Auditor.
12. Meningkatkan kegiatan yang bersifat consulting kepada Satker yang berada di Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Bawahnya.
13. Melaksanakan pemeriksaan mendadak (Misterious Shoper).
14. Melaksanakan dan mengefektifkan SATGASUS MA.
15. Koordinator Asesor PMPRB.
16. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Internal Audit Capability Model.
17. Melaksanakan kebijakan Sapu bersih Pungutan Liar di lingkungan Mahkamah Agung RI.
18. Melaksanakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).
19. Sosialisasi, evaluasi dan penguatan IT SIWAS.
20. Validasi data e LHKPN satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. PROGRAM

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
3. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

BAB V
PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019, program kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun Anggaran 2018 telah melakukan hasil restrukturisasi program bahwa satu Eselon I satu Program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

I. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I

1. Pemeriksaan kasus (pengaduan/ Penangan pengaduan masyarakat).
 Pada tahun anggaran 2018 diperkirakan Badan Pengawasan akan menangani surat pengaduan ± sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) surat pengaduan yang akan ditangani dengan pembentukan tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung ± sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) sedangkan 500 surat pengaduan akan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding masing-masing dan akan dijawab dengan surat sebanyak 1000 surat. Diteruskan ke Mahkamah Agung sebanyak 400 surat.
 Penanganan Kasus Wilayah I ditargetkan 35 LHP.
 Penanganan Kasus Wilayah II ditargetkan 60 LHP.
 Penanganan Kasus Wilayah III ditargetkan 35 LHP.
 Penanganan Kasus Wilayah IV ditargetkan 18 LHP.
2. Pengawasan reguler akan dilaksanakan di beberapa Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di wilayah I, II, III dan IV dengan obyek pemeriksaan meliputi: Manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Pelayanan Publik, dan pelaksanaan anggaran.
 Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah I** direncanakan pada :
 A. Tanggal 5 Februari s/d 16 Februari 2018 dan sebanyak 29 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN
Aceh	PN Idi	MS Idi	
	PN Lhoksukon	MS Lhoksukon	
Sumut	PN Binjai	PA Binjai	
		PA Simalungun	
		PA Panyabungan	
Sumbar	PN Batusangkar	PA Batusangkar	
	PN Pariaman	PA Pariaman	
Riau	PN Tembilahan	PA Tembilahan	
	PN Pangkalan Kerinci		

Jambi	PN Sarolangun	PA Sarolangun	
	PN Sengeti	PA Sengeti	
Sumsel	PN Lahat	PA Lahat	
	PN Muara Enim	PA Muara Enim	
Bengkulu	PN Argamakmur	PA Argamakmur	
Kepri	PN Batam	PA Batam	
		PA Natuna	

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah II** direncanakan pada :

A. Tanggal 2 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 24 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN / Pajak	Militer
Jawa Barat		PA Bogor		Dilmil Bandung
		PA Sukabumi		
		PA Depok		
Jawa Tengah	PN Salatiga	PA Salatiga	PTUN Semarang	Dilmil Semarang
	PN Magelang	PA Demak		
	PN Temanggung	PA Rembang		
	PN Wonosobo	PA Wonosobo		
	PN Wonogiri	PA Purworejo		
	PN Boyolali	PA Banyumas		
		PA Purbalingga		
		PA Karanganyar		
Jawa Timur	PN Surabaya	PA Bawean		
	PN Bondowoso	PA Kraksaan		
	PN kraksaan			

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah III** direncanakan pada :

A. Tanggal 9 sd 20 April 2018 sebanyak 20 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN
Kalimantan Barat	PN ketapang	PA Ketapang	
	PN Sambas	PA Sambas	
Kalimantan	PN Muara Teweh	PA Muara Teweh	

Tengah			
Kalimantan Selatan	PN Kandangan	PA Kandangan	
		PA Banjarmasin	
Sulawesi Utara	PN Bitung	PA Bitung	
Sulawesi Tengah	PN Palu	PA Kodya Palu	
	PN Toli-toli	PA Toli-toli	
Sulawesi Selatan	PN Watampone	PA Watampone	
Sulawesi Tenggara	PN Kendari	PA Kendari	
Gorontalo		PA Gorontalo	

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah IV** pada 2 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 17 satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	Militer	TUN
NTT	PN Oelamasi	PA Kupang		PTUN Kupang
	PN Kupang	PA Maumere		
		PA Larantuka		
		PA Waikabubak		
Maluku	PN Saumlaki		Dilmil Ambon	
Jayapura	PN Sorong	PA Jayapura	Dilmil Jayapura	
	PN Manokwari	PA Sentani		
		PA Painai		

3. Laporan Tindak Lanjut LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan :

a. Monitoring

Adapun pelaksanaan Monitoring direncanakan pada:

- A. Tanggal 1 s/d 10 Mei 2018 sebanyak 12 Satker, terdiri dari dua wilayah Yaitu:

Wilayah	Provinsi
I	Aceh
	Sumatera Utara
	Sumatera Barat
II	Jawa Barat
	Jawa Tengah

	Jawa Timur
III	Sulawesi Selatan
	Kalimantan Selatan
	Kalimantan Barat
IV	NTT
	NTB
	Maluku Utara

4. Pemeriksaan Keuangan DIPA/ Perkara

Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan DIPA/Perkara direncanakan pada:

NO.	NAMA SATUAN KERJA (WILAYAH)	TANGGAL PELAKSANAAN
1	PN Kabanjahe (WIL I)	Plk : 20-08-18 s.d 24-08-18
2	PN Dumai (WIL I)	Plk : 20-08-18 s.d 24-08-18
3	PN Metro (WIL I)	Plk : 20-08-18 s.d 24-08-18
4	PA Tanjung Pinang (WIL I)	Plk : 20-08-18 s.d 24-08-18
5	PN tegal (WIL II)	Plk : 20-08-18 s.d 24-08-18
6	PA Kab. Malang (WIL II)	Plk :17-09-18 s.d 21-09-18
7	PN Watampone (WIL III)	Plk :17-09-18 s.d 21-09-18
8	PA Gorontalo (WIL III)	Plk :17-09-18 s.d 21-09-18
9	PN Sumbawa Besar (WIL IV)	Plk :17-09-18 s.d 21-09-18
10	PN Dompnu (WIL IV)	Plk :17-09-18 s.d 21-09-18

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah I** direncanakan pada: Tanggal 31 Juli s/d 3 Agustus 2018 dan 2 s/d 12 Oktober 2018 sebanyak 30 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Aceh	PN Kutacane	MS Kutacane		
	PN Tapaktuan	MS Tapaktuan		
Sumut	PN Tanjung Balai	PA Kabanjahe		
	PN Kabanjahe	PA Lubuk Pakam		
		PA Pandan		
Sumbar	PN Payakumbuh	PA Sijunjung	PTUN Padang	

		PA Maninjau		
		PA Payakumbuh		
Pekanbaru		PA Selat Panjang		
		PA Ujung Tanjung		
Jambi	PN Kuala Tungkal		PTUN Jambi	
Sumsel	PN Baturaja			Dilmil Palembang
Lampung	PN Metro			
	PN Kotabumi			
Bengkulu	PN Manaa			
	PN Tais			
Kepulauan Riau		PA Tarempa		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah II** direncanakan pada: Tanggal 31 Juli s/d 3 Agustus 2018 dan 2 s/d 12 Oktober 2018 sebanyak 30 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Jawa Barat	PN Ciamis			
	PN Bekasi			
	PN Indramayu			
	PN Kuningan			
	PN Sumber			
	PN Cibinong			
Jawa Tengah	PN Pati	PA Brebes		
	PN jepera	PA Kebumen		
Yogya	PN Yogyakarta			
	PN Wonosari			
	PN Sleman			
Jati Timur	PN lamongan	PA jombang		
	PN Jember	PA Situbondo		
		PA Kraksaan		
Bali	PN Tabanan	PA Bangli		
	PN Amlapura	PA Gianyar		
	PN Gianyar			
Banten		PA Serang		

		PA Cilegon		
--	--	------------	--	--

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah III** direncanakan pada:
Tanggal 5 s/d 8 Juni 2018 sebanyak 24 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
Kalimantan Barat	PN Singkawanag	PA Sintang		
	PN Sintang			
Kalimantan Tengah	PN Buntok	PA Palangkaraya		
Kalimantan Selatan	PN Banjarmasin	PA Barabai		
	PN Martapura			
Kalimantan Utara	PN Tanjungselor			
Kalimantan Timur		PA Tanjung Selor		
		PA Sangata		
Sulawesi Utara	PN Tondano	PA Tondano		
Sulawesi Tengah	PN Buol	PA Parigi		
Sulawesi Selatan	PN Pare-pare	PA Pare-pare		
	PN Watansopeng			
Sulawesi Tenggara	PN Andoolo	PA Andoolo		

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk **Wilayah IV** direncanakan pada:
Tanggal 1 s/d 10 Mei 2018 sebanyak 8 Satker, terdiri dari:

Propinsi	Umum	Agama	TUN	Militer
NTT	PN Kalabahi			
Maluku	PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon	
Maluku Utara	PN Soa Sio	PA Ternate		
Jayapura	PN Serui	PA Sorong		

6. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah 1 s/d 4 sebagai berikut
Pelaksanaan Pemeriksaan Reviu direncanakan pada:

NO.	NAMA SATUAN KERJA (WILAYAH)	TANGGAL PELAKSANAAN
1	PN Padang	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18

2	PN Bengkulu	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
3	PN Tanjung Pinang	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
4	PN Bangil	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
5	PA Sampang	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
6	Dilmil Semarang	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
7	PN Tahuna	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
8	PN Palu	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
9	PN Pangkajene	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
10	Dilmil Ambon	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
11	PN Jayapura	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18
12	PN Timika	Plk : 19-11-18 s.d 23-11-18

Audit Kepegawaian Wilayah 1 s/d 4 sebagai berikut

Pelaksanaan Pemeriksaan direncanakan pada:

1. Audit Manajemen Kepegawaian di Biro Kepegawaian Tanggal 19 s/d 23 Maret 2018.
2. Audit Manajemen Kepegawaian di Ditjen Badilag Tanggal 14 s/d 18 Mei 2018.
3. Audit Manajemen Kepegawaian di Pusdiklat Bogor Tanggal 23 s/d 27 Juli 2018.
4. Audit Manajemen Kepegawaian di PT Banten Tanggal 16 s/d 20 Oktober 2018.

II. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini meliputi :

1079.950.00	
1	Tenaga Pengawas Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Sistem Pengawasan
	Pengembangan Sumber daya aparatur Bawas
052	Pengembangan SDM Bawas
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM bawas meliputi kegiatan : a. Diklat SPIP b. Diklat Manajemen Resiko Sektor Publik c. Diklat Audit Berbasis Resiko d. Character Building
053	Pembinaan Hakim Pengawas Bidang
	Pelaksanaan pembinaan hakim pengawas bidang akan dilaksanakan pada bulan Maret . Yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di Propinsi Lampung.
054	<i>Pelantikan Hakim Tinggi/Pejabat Struktural dan Penyempahan Hakim Yustisial</i>

	Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari, Juli, Desember 2018
055	<i>Asesment</i>
	Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Lembaga Psikologi PPM dan dilaksanakan pada Minggu 2 Juni 2018 dengan target peserta 55 orang pegawai atau calon Hatimwas, Hakim Yustisial yang akan promosi ke Badan Pengawasan MA RI
056	<i>Studi Banding Luar Negeri</i>
	Kegiatan Studi Banding LN ke Australia/ Eropa akan dilaksanakan dalam rentang waktu Maret sd Desember 2018.
	Penguatan Sistem Tata Kelola Pengawasan
	Kegiatan Penguatan Sistem Tata Kelola Pengawasan yang meliputi : a. Sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan akan dilaksanakan pada minggu III bulan September 2018 yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di : - Propinsi Bali b. Quality Assurance akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juli, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di : - Propinsi Kalimantan Selatan - Propinsi Sumatera Selatan c. Consulting akan dilaksanakan pada bulan April dan Agustus, yang akan diikuti sebanyak 100 orang diselenggarakan di : - Propinsi Jawa Tengah - Propinsi Jawa Barat d. Implementasi E-Audit Akan dilakukan pada minggu ke 4 bulan Oktober tahun 2018
058	Evaluasi SKP
	Kegiatan Evaluasi SKP akan dilaksanakan pada Bulan Januari 2018 diikuti seluruh personel Badan Pengawasan MA RI
1079.950.002	Dokumen Tata Kelola
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan
	a. Perencanaan Renstra/Renja/RKA-KL
	Penyusunan Dokumen Perencanaan : RKAKL, Penyusunan Reviu Renstra, Program Kerja dan Perencanaan : Rakorbangpus, Trilateral Meeting Pagu Indikatif (Jan sd April 2018) Penyusunan : Penjabaran Pagu Indikatif dalam Renja dan RKA-KL, Penyesuaian Angka Dasar, Inisiatif Baru, dan Pagu anggaran K/L (Mei sd Juli 2018) Pembahasan : Penyusunan RKA-KL Alokasi Anggaran, Pembahasan dengan DPR untuk new inisiatif, Penyesuaian New Inisiatif, Penelaahan RKA-KL, Hasil Penelaahan sebagai bahan penyusunan RUU APBN, Penetapan alokasi Anggaran K/L (Agustus sd Okt 2018) Penetapan : Penyerahan DIPA ke satuan kerja masing-masing (Nop sd Des 2018)
052	Penyusunan Laporan Keuangan
	Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan mengikuti jadwal yang ditetapkan BUA MA RI dan Kementerian Keuangan yakni pada awal tahun yakni Januari dan Februari untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun sebelumnya dan bulan Juli untuk Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018.
053	<i>Pengelolaan Administrasi Keuangan dan LPJ Bendahara</i> Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
054	<i>Laporan Tahunan Badan Pengawasan MA RI dan Mahkamah Agung RI</i> Rapat koordinasi pembahasan awal draft LAPTAH TA 2018 Bulan Agustus sd Desember 2018 dan untuk LAPTAH MA dikerenakan ada pemilihan KMA yang baru

		KMA di bulan Februari, kegiatan penyusunan LAPTAH MA RI pada bulan Januari 2018.
055	c. d.	<i>Penyusunan LKJIP dan Evaluasi LKJIP</i> Rapat koordinasi pembahasan awal draft LKJIP Bulan Agustus sd Desember 2018 <i>EVALUASI LKJIP</i> Bulan Mei : Penyusunan Draft Awal LHE Bulan Juni : Penyempurnaan draf LHE Bulan Juli : Penyusunan LHE Bulan Agustus : Penyempurnaan LHE
057	.	<i>Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI</i> Pelaksanaan evaluasi RB Mahkamah Agung RI bulan April sd Juni 2018
058	.	<i>Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Evaluasi Standar Pelayanan, dan Evaluasi Jabatan</i> Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal Agustus sd September 2018
060		<i>Pengelolaan Administrasi Umum</i> Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Oktober 2018
061		<i>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i> Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Oktober 2018
C		TLHP BPK / Bawas
		Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil temuan dari BPK maupun internal Badan Pengawasan untuk mengetahui adanya temuan yang dilaporkan. Kegiatan ini meliputi monitor TLHP dan Monitoring TLHP yang akan dilakukan pada minggu ke 2 bulan Mei 2018. Dan untuk kegiatan pemanggilan, sidak, supervisi pimpinan dan perjalanan dpimpinan dapat dilakukan sepanjang tahun sesuai kebutuhan di lapangan dan perintah pimpinan.
D		Sidang Majelis Kehormatan Hakim
		Kegiatan ini disesuaikan dengan permintaan (perintah) pimpinan Mahkamah Agung atau laporan dari Komisi Yudisial terhadap para hakim terindikasi melakukan penyimpangan kode etik.
E		Layanan Perkantoran
	a.	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama 13 bulan layanan
	b.	<i>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i>
		Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 4 Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2 Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		Terlaksananya Kegiatan Perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 6 Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		<i>Kerjasama Antar Instansi Pemerintah</i> Kegiatan ini melibatkan instansi MENPAN dan RB, TP 5000, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember 2018.
		<i>Tersedianya pakaian kerja</i> Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018
		<i>Terpeliharanya peralatan kantor</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		<i>Terlaksananya pengiriman surat dinas</i>

		Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		<i>Terpeliharanya Jaringan/ Sistem Informasi dan Peralatan IT</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		<i>Terlaksananya pelaksanaan barang dan jasa</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Pejabat/Hakim Tinggi/Struktural/Staf</i> Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018.
	c.	<i>Sewa mesin fotokopi</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
	d.	<i>Jamuan rapat/koordinasi/terima tamu/delegasi</i> Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari – Desember 2018.
F.		Layanan Internal (Overhead)
	a.	<i>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi</i> Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Februari sd April 2018 untuk pelaksanaan pengadaan 20 unit barang.
	b.	<i>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor</i> Tahap persiapan sampai dengan pelaporan dimulai Bulan Februari sd Maret 2018 untuk pelaksanaan pengadaan 9 unit barang.

BAB VI

TANTANGAN KEDEPAN

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi Pengawasan Peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Tantangan kedepan Badan Pengawasan diantaranya:

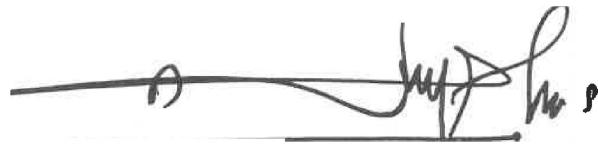
1. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Masih rendahnya dukungan yang berkelanjutan dan komitmen baik dari internal maupun eksternal secara terus menerus.
4. Belum adanya pedoman mengenai APIP.
5. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
6. Semakin bertambahnya kegiatan yang dibebankan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai koordinator kegiatan PMPRB Mahkamah Agung RI dan quality assurance pelaksanaan RB di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

BAB VII PENUTUP

Program kerja tahun 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan (RKT).

Berhasilnya pelaksanaan program kerja tahun 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan anggaran dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Akhirnya program kerja tahun 2018 ini dapat dijadikan bahan kajian yang terus disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



Nugroho Setiadji

